

ABSTRAK

BAHRUL ILMI, NPM : 2022176 Judul Skripsi “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OVER DIMENSION AND OVER LOADING (ODOL) DI RUAS JALAN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS JALAN H.BRIGJEN H. HASAN BASRI)**” dibawah bimbingan Bapak **Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP** sebagai pembimbing I dan **Bapak Selamat Riadi, S.Sos, M.AP** sebagai pembimbing II.

ODOL adalah kondisi ketika kendaraan angkutan barang beroperasi dengan dimensi melebihi ketentuan (*over deminsion*) atau dengan muatan berlebih (*over loading*). Penelitian ini berdasarkan pada fenomena masalah yaitu, Kendaraan ODOL berkontribusi pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, Terjadinya kemacetan yang sulit dihindari dikarenakan ruas jalan yang sempit, dan Kerusakan infrastruktur seperti jalan dikarenakan kendaraan dengan muatan berlebih sulit dikendalikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan *Over Dimension and Over Loading* Di Ruas Jalan Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Jalan H.Brigjen Hasan Basri) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data teknik penarikan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan 11 orang informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dianalisis dengan teknik data yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji Kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan *Over Dimension and Over Loading (ODOL)* di Ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari kejelasan standar dan sasaran kebijakan yang telah berjalan dengan baik, ketersediaan staf yang memadai, penyampaian informasi, kedisiplinan petugas, serta koordinasi antar instansi dan masyarakat yang cukup baik. Pelaksanaan kebijakan masih kurang baik karena keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kewenangan dan kompetensi petugas, serta tanggapan pelaksana kebijakan yang belum baik. Faktor sosial, politik, dan ekonomi juga belum baik. Faktor pendukung antara lain: Untuk mengurangi pelanggaran Lalu Lintas dan memberikan pemahaman kepada sopir Faktor penghambat yaitu: masih banyak truk odol yang melintas, tidak ada penilangan, dan fasilitas yang memadai.

Disarankan kepada Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas, Pengusaha angkutan, dan sopir Diperlukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan ODOL guna memperkuat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha angkutan. Partisipasi aktif sopir dan pengusaha menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kebijakan serta menekan angka kecelakaan dan kerusakan infrastruktur jalan. Selain itu, penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti jembatan timbang dan alat ukur dimensi kendaraan perlu dioptimalkan untuk menjamin implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

BAHRUL ILMI, NPM : 2022176 Thesis Title “IMPLEMENTATION OF OVER DIMENSION AND OVER LOADING (ODOL) POLICY ON THE HULU SUNGAI UTARA ROAD (CASE STUDY OF H.BRIGJEN H. HASAN BASRI ROAD)” under the guidance of **Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP** as supervisor I and **Selamat Riadi, S.Sos, M.AP** as supervisor II.

ODOL is a condition when a goods transport vehicle operates with dimensions exceeding the provisions (over dimension) or with an excessive load (overloading). This research is based on the problem phenomenon, namely, ODOL vehicles contribute to the increasing number of traffic accidents, the occurrence of congestion that is difficult to avoid due to narrow roads, and damage to infrastructure, such as roads, because vehicles with excessive loads are difficult to control. The purpose of this research is to find out how the Implementation of Over Dimension and Over Loading Policies on the Hulu Sungai Utara Road Section (Case Study of H. Brigjen Hasan Basri Road) and the factors that influence it.

This research method uses descriptive qualitative. The data source used purposive sampling, resulting in 11 informants. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. Data credibility was tested through extended observation, increased persistence, and triangulation of evidence.

The results of the study indicate that the implementation of the Over Dimension and Over Loading (ODOL) Policy on the Brigjen H. Hasan Basri Road Section, Hulu Sungai Utara Regency is quite good. This can be seen from the clarity of the standards and targets of the policy that have been running well, the availability of adequate staff, the delivery of information, the discipline of officers, and the coordination between agencies and the community that is quite good. The implementation of the policy is still not good due to limited facilities and infrastructure, the lack of authority and competence of officers, and the response of policy implementers that has not been good. Social, political, and economic factors are also not good. Supporting factors include: To reduce traffic violations and provide understanding to drivers Inhibiting factors are: there are still many odol trucks passing, there are no tickets, and adequate facilities.

It is recommended that the Transportation Agency, Traffic Unit, transportation operators, and drivers enhance socialization and coordination among agencies to implement the ODOL policy, thereby strengthening understanding and compliance among transportation operators. Active participation by drivers and operators is a crucial factor in supporting the effectiveness of the policy and reducing the number of accidents and damage to road infrastructure. Furthermore, strengthening regulations, consistent law enforcement, and the provision of supporting facilities and infrastructure, such as weighbridges and vehicle dimension measuring devices, need to be optimized to ensure effective and sustainable policy implementation.